



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 863/V/2015

III/MEI 2015

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Jakarta, 13 - 15 Mei 2015

didukung oleh:



Ketua DPR Buka Pameran dan Edukasi Produk Ekonomi Kreatif

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

Ketua DPR Buka Pameran dan Edukasi Produk Ekonomi Kreatif



Ketua DPR RI Setya Novanto membuka Pameran dan Edukasi Produk Ekonomi Kreatif

Ketua DPR RI Setya Novanto membuka secara resmi Pameran dan Edukasi Produk Ekonomi Kreatif yang digagas oleh organisasi Dari Perempuan Untuk Bangsa (DPUB). Ia menyambut baik kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung kesiapan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menghadapi pasar bebas Asean yang mulai berlaku pada akhir 2015 nanti.

“Saya bangga DPUB berinisiatif menggelar pameran ini sebagai bentuk dukungan kepada UKM kita untuk dapat bersaing dengan negara lain

terutama di kawasan Asean,” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai acara di Gedung Caraka Loka, Kemenlu, Jakarta, Rabu (13/5/15).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan DPR dalam posisi siap berkontribusi karena pasar bebas nantinya akan bermuara pada terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Wakil rakyat menurutnya perlu mengurai regulasi yang perlu diperkuat agar dapat memberdayakan pengusaha dalam negeri.

“Perlu mendukung sejumlah produk

regulasi misalnya RUU terkait UKM, RUU terkait penjaminan. Kita perlu mendorong agar perbankan memberikan kemudahan bagi pengusaha UKM untuk mendapat modal tambahan,” tutur dia.

Didampingi Ketua Pelaksana Okke Hatta Rajasa, Ketua DPR berkesempatan melakukan peninjauan 59 stand pengusaha UKM yang semuanya telah menjadi binaan sejumlah BUMN. Ia juga menunjukkan ketertarikannya ketika mendengar penjelasan tentang Klinik UKM yang disiapkan panitia.

“Kami merasa perlu untuk berbuat sesuatu yang kongkrit. Keunikan kegiatan ini bukan hanya sekedar pameran produk usaha kreatif di bidang wisata, kriya dan boga namun juga adanya klinik konsultasi bisnis dan pembekalan bagi usaha kreatif,” jelas Okke kepada Setnov begitu ia biasa dipanggil.

Dalam kunjungan keliling itu Ketua DPR juga berkesempatan belanja dompet kulit dan tempat pulpen meja dengan hiasan Gedung Nusantara DPR yang diukir menarik. Ia tertawa dan mengangguk pada saat membayar ada panitia yang menceletuk. “Pak Ketua bayarannya nggak usah ada kembalian ya.” Adegan ini disambut tawa segar pengunjung lain. (iky) foto: denus/parle/hr

Stok Beras Harus Diperhitungkan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Pemerintah untuk benar-benar memperhitungkan stok beras di pasaran. Jangan sampai ada kelangkaan beras, apalagi harganya sampai melonjak. Mengingat, kenaikan beras jelang bulan Ramadhan sudah seperti tradisi di Indonesia.

“Persiapan stok beras kita ini memang harus benar-benar dipikirkan dan diperhitungkan, jangan sampai nanti kekurangan dan harganya melonjak, sehingga merugikan

masyarakat. Karena harga beras yang tinggi, yang kemarin sempat menembus angka Rp 13.000 per kilogram, pasti membuat daya beli masyarakat berkurang dan ini menimbulkan angka kemiskinan kita semakin tinggi,” kata Fadli dari Gedung Nusantara III, Selasa (12/05/15).

Politisi F-Gerindra ini mengakui, belum ada sinkronisasi antara data stok beras dan kebutuhan beras di masyarakat. Sehingga, angka produksi dan konsumsi tidak berjalan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

beriringan.

“Memang yang pelik, selalu dikatakan di data bahwa produksi beras kita meningkat, dikatakan cukup artinya kita swasembada tapi kenyataannya harga beras cenderung tinggi. Mungkin kendalanya adalah data kita belum betul-betul data yang akurat, jadi antara produksi dengan konsumsi tidak sama dan tidak seiring. Ini yang membuat di lapangan itu agak berbeda,” analisa Fadli.

Terkait isu rencana impor beras, Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini menegaskan, hal ini bertentangan dengan kemauan pemerintah yang mau mengharamkan impor beras. Padahal, imbuh Fadli, jika produksi beras dikatakan cukup, jangan sampai harus impor beras.

“Jika impor, ini yang rugi adalah petani. Kalau nanti ada impor beras berarti kita tidak swasembada pangan, dan itu bertentangan dengan pernyataan Pemerintah yang mengharamkan impor beras,” tukas Fadli.

Fadli menghimbau, jika Pemerintah serius menjalankan program swasembada pangan, harus ada kebijakan pangan nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari pra hingga pasca panen. (sf, denus)/foto:denus/parle/iw.

Pelajar Harus Bisa Bersaing di Era Globalisasi

Pelajar Indonesia harus bisa bersaing di era globalisasi yang mulai merambah ke seluruh penjuru dunia. Diharapkan, dari generasi yang siap saat ini, muncul bibit-bibit pemimpin untuk masa depan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima perwakilan guru dan siswa dari SMA Muhammadiyah 18, Jakarta, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Selasa (12/05/15).

“Kita berharap pelajar-pelajar kita bisa bersaing di era globalisasi dan makin banyak muncul calon tokoh-tokoh dan pemimpin bangsa dari generasi baru sekarang ini,” harap Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini, usai acara.

Politisi Gerindra ini menambahkan, tingkat Sekolah Menengah Atas merupakan masa-masa karakter pelajar dibentuk. Sehingga perlu diisi oleh kegiatan yang produktif dan positif. Termasuk pendidikan politik.

“Kehidupan pelajar harus diisi oleh kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif. Media adalah salah satu yang



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima perwakilan guru dan siswa SMA Muhammadiyah 18, Jakarta

tidak boleh dipisahkan, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, kemampuan menulis dan membaca dari siswa, saya kira itu menjadi modal mereka untuk maju di perkembangan pendidikan berikutnya atau di masyarakat,” jelas Fadli.

Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini pun menegaskan, pelajar SMA yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk, ber-

hak untuk mendapatkan pendidikan politik. Apalagi, mereka sudah memiliki hak suara pada Pemilihan Umum.

“Mereka harus mengetahui, paling tidak politik perkembangan politik sehingga nantinya mereka menjadi pemilih cerdas, dan mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan yang menurut mereka terbaik,” harap Fadli.

(sf,denus)/foto:denus/parle/iw.

Pancasila Tak Diubah Meski UUD 45 Diamandemen



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dari beberapa kampus

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, Pancasila adalah dasar negara yang digali dari budaya dan falsafah bangsa, sehingga tidak ada perubahan pada Pancasila. Bahkan, amandemen UUD 1945 hingga empat kali, Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 dilarang untuk diubah.

Demikian dikatakan Fahri saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dari beberapa kampus. Mereka mendatangi Gedung DPR dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasinya, di ruang rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Senin (11/05/15).

“Isi UUD 1945 ada empat kali perubahan. Manusia yang menciptakan konstitusi, bisa saja melakukan kesala-

lahan. Dalam amandemen itu, intinya kita switch konsentrasi menguatkan negara itu melalui penguatan rakyat, bukan penguatan negara itu semata. Tapi, rakyat lah yang kuat,” jelas Fahri saat pertemuan.

Politisi F-PKS ini mengatakan bahwa pasal-pasal pada UUD 1945 hasil amandemen, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sudah dijunjung tinggi. Mengingat, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Silahkan baca pasal-pasal mengenai HAM di UUD 1945, betapa kita diberikan kekuatan di sana. Sehingga setiap orang tidak boleh dianiaya, tidak boleh di hukum tanpa prosedur, tidak boleh

dicabut hak dasarnya. Karena paham negara beralih dari sosialistik otoriter kepada liberalistik demokrasi, tapi kita fokus pada demokrasi,” jelas Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini.

Sementara itu sebelumnya, Ivan Latifan Fadila, salah seorang perwakilan mahasiswa FISIP se-Indonesia ini menyatakan bahwa tujuan datang ke Gedung DPR adalah ingin menyampaikan amanat rakyat dan pemikiran mahasiswa FISIP dari seluruh Indonesia.

Mahasiswa UIN Bandung ini mengatakan, pada Februari lalu, BEM FISIP seluruh Indonesia mengadakan acara FISIP Movement, dan telah menyepakati *joint statement*, yang isinya tuntutan di bidang kelautan dan perikanan, ekonomi kerakyatan, pangan nasional, dan budaya.

“Kami menuntut kedaulatan nasional dari berbagai sektor. Masalah Indonesia sudah terlalu kompleks dan multidimensi. Untuk menyelesaikan permasalahan, semua lembaga negara harus menyepakati untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 naskah asli,” tuntutan Ivan.

Dalam kesempatan ini, perwakilan mahasiswa berasal dari UIN Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan Universitas 1945 Bekasi. Di akhir acara, Fahri sempat memberikan cinderamata berupa buku karangannya sendiri berjudul *Negara, Pasar, dan Rakyat*. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Apresiasi Warga Bekasi Ciptakan Kerukunan Beragama

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan rakyat, Fahri Hamzah mengapresiasi keinginan dan niat warga Bekasi untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Bekasi khususnya dan Indonesia pada umumnya.

“Saya berterima kasih kedatangan teman-teman dan mengapresiasi keinginan untuk menciptakan kerukun-

an hidup umat beragama di Bekasi khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hal ini akan kami teruskan ke komisi terkait, namun tentunya kami berharap masukan terkait formulasi kebijakan apa saja yang harus kami dorong agar keinginan bersama tersebut dapat terwujud,”ungkap Fahri saat audiensi dengan Dekan FKSB UNISMA dan FPI DPW Bekasi di ruang rapat

pimpinan DPR RI, Senin (11/5).

Pada kesempatan itu para audiens mengungkapkan tujuannya agar DPR RI meninjau ulang SK bersama tiga menteri dan Undang-undang No.23 tentang Pemerintah daerah, yang intinya menyerahkan pelaksanaan ketertiban dan kelancaran pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluknya itu kepada otonomi Pemerintah daerah.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah audiensi dengan Dekan FKSB UNISMA dan FPI DPW Bekasi

Sementara pada kenyataannya menurut audiens Pemda seringkali tidak hadir ketika terjadi konflik di masyarakat yang melibatkan umat beragama.

“Permasalahan kerukunan umat be-

ragama menjadi wewenang pemerintah daerah, namun seringkali Pemda malah tidak hadir ketika terjadi gesekan sosial. Hanya sebatas pelanggaran ketertiban dan keamanan saja.

Tidak ada penyelesaian di dalamnya,” ungkap Ketua DPC FPI Bekasi, Budi Santoso.

Sementara itu, Dekan Fakultas Komunikasi, sastra dan bahasa Universitas Islam ‘45” Bekasi, Andi Sopandi mengatakan bahwa konflik yang pernah mencuat beberapa waktu lalu di daerah Bekasi sejatinya tidak ada kaitannya dengan agama. Melainkan akibat pergeseran budaya dalam masyarakat urban, serta adanya transformasi dari masyarakat agraris ke perindustrian. Dan untuk sebuah masyarakat heterogen, gesekan kecil merupakan sebuah hal yang wajar.

Oleh karena itu keduanya beranggapan butuh peran serta seluruh pihak terutama Pemerintah daerah dalam merespon berbagai permasalahan masyarakat tersebut. Selama ini keduanya melihat Pemda Bekasi kurang merespon hal itu. (Ayu)/foto:naefurodji/parle/iw.

Taufik: Kelak Ada Siswa Banjarnegara Jadi Wakil Rakyat



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima siswa Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah, Sewodadi, Banjarnegara, Jateng

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap, kelak ada salah satu siswa dari Banjarnegara yang menggantikannya menjadi wakil rakyat di DPR RI. Tekad dan ketekunan belajar harus dilakukan para siswa. Lalu, menggantungkan cita-citanya setinggi langit.

Demikian disampaikan Taufik (dapat

Jateng VII) saat menerima para siswa Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah, Sewodadi, Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng). “Suatu saat ada siswa MTs dari Sewodadi ini yang jadi Pimpinan DPR, Menteri, bahkan Presiden,” kata Taufik di hadapan para siswa dan guru MTs tersebut, Jumat (8/5), di ruang

Operation Room DPR.

Para siswa tersebut mendatangi DPR RI untuk mempelajari fungsi dan tugas para anggota Dewan, sekaligus melihat dari dekat ruang-ruang sidang yang biasa digunakan para anggota DPR untuk melakukan rapat dengan para menteri. Para siswa juga berkesempatan melihat ruang Gedung Nusantara, tempat Presiden dan wakilnya dilantik.

Kepada Parleментарia usai pertemuan, Politisi PAN itu mengatakan, kunjungan para siswa ini sangat penting bagi pendidikan politik. Selama ini, sambungnya, para siswa hanya melihat aktivitas para politisi dari layar kaca. Dengan mendatangi gedung DPR, pengetahuan para siswa kian bertambah, karena mendapat ilmu dari lokasi *study tour*-nya langsung.

“Mereka melihat langsung, karena ini gedung milik kita semua, sehingga otomatis anak didik kita punya hak untuk belajar di sini,” ujar Taufik. Setidaknya ada seratusan siswa kelas delapan MTs Muhammadiyah Sewodadi yang berkunjung ke DPR. Mereka didampingi Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, dan para Guru pembimbingnya. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Perangi Narkoba Harus Diimbangi Kemampuan Diplomasi



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pemerintah yang bersikap tegas memerangi narkoba adalah konsekuensi pilihan kebijakan. “Saya sangat mendukung hukuman mati itu dilakukan, sebagai sinyal kita perang narkoba sebab narkoba ini satu kejahatan yang sangat serius. Namun di sisi lain harus diimbangi kemampuan diplomasi kita kepada negara-negara sahabat yang terkena dampak termasuk Australia, Perancis dan negara-negara lain,” kata Fadli, baru-baru ini menanggapi protes Australia terhadap pelaksa-

naan eksekusi mati gembong narkoba di Nusakambangan.

Menurut Pimpinan DPR Koordinator Polkam ini, Presiden juga perlu mempertimbangkan hubungan dengan negara-negara sahabat. Bukan berarti kita melemah, tetapi perlu dipikirkan dampaknya. Kalau negara-negara tersebut yang tadinya bersahabat kemudian menjadi musuh.

“Kebijakan *zero enemy* itu menurut saya penting bagi Indonesia, karena dengan melaksanakan hukuman mati berarti tidak ada masalah. Tapi kalau kita punya titik lemah, dianggap tidak adil atau mengejar popularitas, saya kira bisa menjadi masalah bagi negara-negara tersebut,” tegasnya.

Pasalnya, lanjut politisi Gerindra, ini bukan semata-mata narkoba lagi tetapi menyangkut kehormatan sebuah negara. Kalau ada permintaan dari Perdana menteri atau Presiden dan ditolak mentah-mentah, kita harus siap dengan negara tersebut tidak bersahabat lagi.

Saat ditanya apakah perlu kita balas dengan menarik dubes Indonesia dari Australia, kata Fadli, kita sebagai negara yang disorot, maka tidak perlu melakukan tindakan itu. “Presiden bisa mempertimbangkan kalau permintaan dari Kepala Negara setidaknya menunda eksekusi. Kepala negara atau kepala pemerintah paling tidak ada muka di mata bangsanya,” ia menjelaskan.

Begitu ditolak wajar saja kalau mereka marah. Termasuk penundaan eksekusi pada Marry Jean dari Philipina, menurut Fadli kalau masih ada upaya hukum sekecil apapun menyangkut nyawa orang kita harus beri kesempatan, apalagi Sergei dari Perancis, termasuk yang belum akan dieksekusi. “Jadi mestinya ditunda. Jangan sampai nanti gara-gara ini hubungan kedua negara akan memburuk,” pungkias dia.

(mp) foto: iwan armanias/parle/hr

Timing Revisi UU Pilkada Belum Tepat

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Dedy menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada tidak tepat apabila dilakukan saat ini.

“Timing-nya belum tepat, apalagi kalau hanya merevisi satu pasal berkaitan konflik partai. Apa yang diatur dalam UU parpol sudah bisa dioperasikan untuk atasi konflik partai di bawah,” kata Lukman Edy dalam acara forum legislasi bertajuk Revisi UU Pilkada dan UU Parpol, di Gedung DPR,

Jakarta, Selasa (13/5). Dalam forum itu hadir pula Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, Kapuspen Kemendagri Dodi Riatmadji dan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Heri Budianto.

Lukman mengatakan, dalam UU Pilkada memang ada beberapa hal yang perlu direvisi, terutama berkaitan konflik partai. UU Pilkada maupun UU Parpol tidak mengantisipasi kepengurusan partai yang berhak ikut pilkada ketika surat keputusan Kementerian Hukum dan Ham masih dalam gugatan pengadilan.



Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Dedy

“Revisi itu keniscayaan, tapi timing-nya tidak saat ini. Timing revisi UU Pilkada sebaiknya setelah 9 Desember (pemungutan suara pilkada serentak

2015-red),” ujar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lukman lebih setuju untuk mende-sak Mahkamah Agung agar mempercepat proses peradilan Golkar dan PPP sampai inkraht. Dengan begitu, ada kepastian kepengurusan partai yang berhak ikut pilkada. Kalaupun putusan inkraht itu tak juga keluar sampai batas pendaftaran 26-28 Juli 2015, maka kata Lukman, KPU merujuk saja pada putusan yang sudah tetap, yaitu SK Menkum HAM. “Persoalan parpol kan sudah ada payung hukumnya di UU Parpol,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menilai revisi Undang-Undang Pilkada

sarat dengan kepentingan partai poli-tik (parpol) yang sedang berkonflik. Ini terlihat ketika DPR bersikeras agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menga-komodir poin ketiga untuk dimasukkan dalam Peraturan KPU.

“Kalau di publik yang berkembang justru ada motivasi dari teman-teman yang partainya berkonflik memiliki kekuatan di DPR untuk minta diakomodir. Poin ketiga itu mengemuka kuat sekali,” katanya.

Heri meragukan revisi ini diadakan karena untuk mencari payung hukum semata. Tak hanya itu, ia juga mem-pertanyakan komitmen anggota DPR setelah revisi rampung.

Terlebih lagi, sarat kepentingan

kelompok sudah tercium dari timing yang diburu-buru. Sementara untuk undang-undang lain tidak disebut re-visinya.

“Kekhawatiran kita jangan sampai revisi ini akan dipakai kelompok-kelompok tertentu untuk akomodir kepentingan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai sikap pemerintah, Heri menilai Jokowi akan sulit bersikap jika dibawah tekanan politik.

“Melihat gelagat dari Jokowi itu sulit ditebak. Saya baca juga kalau Kemendagri mungkin menolak sehingga tergantung ke presiden,” tegasnya.

(nt/sc)/foto:andri/parle/iw.



Ketua Korpri terpilih Mardian Umar

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) unit Nasional Setjen DPR melaksanakan musyawarah lima tahun dengan tiga agenda utama, membahas laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2010-2015, membahas program kerja lima tahun ke depan dan memilih ketua untuk periode 2015-2020. Proses demokratisasi ini berlan-

Korpri Setjen DPR Pilih Ketua Baru

sung lancar dan berhasil memilih ketua dengan musyawarah mufakat.

“Terima kasih atas kepercayaannya. Mari kita bekerja ke depan untuk membangun Korpri Setjen DPR yang lebih bermartabat, profesional dalam rangka memberikan dukungan yang lebih baik kepada anggota dewan,” kata ketua terpilih Mardian Umar usai musyawarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/15).

Kepala Biro Umum Setjen DPR ini juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Korpri yang dalam musyawarah telah menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan program organisasi diantaranya dengan menyetujui kenaikan iuran anggota sebesar 100 persen. Ia berjanji akan mengedepankan transparansi dengan melaporkan hasil audit secara berkala.

Dalam musyawarah tersebut ada dua kandidat yang dicalonkan anggota untuk maju dalam proses pemilihan.

Namun Setyanta Nugraha yang juga ketua pada periode sebelumnya memilih mengundurkan diri dengan alasan tantangan pekerjaan pada jabatan barunya yaitu Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan.

Sejumlah keberhasilan disampaikan Setyanta dalam laporan pertanggungjawaban diantaranya menjuarai kejuaraan olah raga tingkat nasional, bantuan sosial kepada anggota dan masyarakat yang ditimpa bencana di sejumlah daerah serta memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota.

“Terima kasih atas dukungan dan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2010-2015. Semoga bisa menjadi acuan bagi peningkatan program-program kegiatan Korpri Setjen DPR pada periode yang akan datang,” pungkasnya. (iky)/

foto:andri/parle/iw.

Segera Cairkan BOS Madrasah

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Par-taonan Daulay berharap pemerintah segera mencairkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Pa-salnya, dana BOS itu sangat penting terutama untuk menutupi kekurangan gaji guru-guru honorer yang ada.

“Tidak ada alasan logis argumentatif pemerintah yang dapat diterima untuk menghambat pencairan dana BOS tersebut,” tegas Saleh kepada Parlemen-aria baru-baru ini.

Politisi dari Fraksi PAN ini menilai pencairan dana BOS ini penuh dengan ketidakadilan. Pasalnya, kasus

keterlambatan pencairan dana BOS ini tidak terjadi di sekolah-sekolah umum, namun hanya di madrasah-madrasah. Wajar jika kemudian pengelola madrasah merasa dianaktirikan. Padahal dikatakannya, peranan madrasah dalam mencerdaskan masyarakat sangat besar. Tidak sedikit lulusan madrasah

yang sudah menjadi pemimpin di negeri.

Ditambahkannya, dana BOS selain untuk membayar gaji guru honorer, juga diperlukan untuk menutupi biaya operasional sekolah lainnya. Terlebih lagi bagi madrasah swasta di daerah pelosok, bantuan BOS ini tentu sangat penting. Setidaknya, madrasah-madrasah itu bisa memanfaatkan untuk membeli keperluan rutin sekolah seperti alat tulis, penghapus, spidol, dan lain-lain.

“Saya sempat menanyakannya ke Irjen (inspektorat jenderal), Sekjen, bahkan Menteri Agama. Mereka memiliki jawaban yang seragam, terlambatnya pencairan dana BOS bagi madrasah dikarenakan Kementerian Keuangan mengubah aturan pola pencairannya. Selama ini, dana BOS dicairkan melalui akun 57, sementara peraturan baru harus dicairkan melalui akun 52. Aturan ini berimplikasi besar bagi proses pencairan dana. Walaupun dananya



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonnan Daulay

sudah ada di daerah, para pejabat Kemenag di daerah ternyata tidak berani mencairkannya karena takut terjadi kesalahan,” ungkap Politisi dari Dapil Sumut II ini.

Saleh memahami bahwa aturan itu dibuat karena khawatir terjadinya penyalahgunaan. Namun jika demikian, semestinya bukan pencairannya yang dihambat, melainkan pengawasannya yang ditingkatkan. Sehingga dana BOS

itu tetap sesuai dengan peruntukannya.

“Saya berharap aturan ini perlu dikaji ulang karena menyangkut peningkatan kualitas pendidikan nasional. Apalagi, ternyata, sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud tetap mencairkan dana BOS meskipun telah ada aturan itu. Sementara tidak demikian dengan madrasah. Kalau begini, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Setidaknya, terlihat lemahnya koordinasi antara kementerian lembaga yang ada,” ujarnya.

Selama masa reses ini, tidak sedikit aspirasi dari berbagai daerah yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana BOS ini. Sebut saja madrasah-madrasah di daerah Sumatera Utara. Bahkan, di Pamekasan ada kepala Madrasah yang terpaksa melelang motornya seharga 7,5 juta rupiah untuk menutupi pembayaran guru honorer di sekolahnya. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/iw

Pengurus Korpri Harus Mampu Bekerja Ikhlas



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dalam pelantikan Pengurus Korpri yang baru

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti mengingatkan anggota dan pengurus Korps Pegawai Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) perlu mengedepankan keikhlasan agar dapat sukses menjalankan roda organisasi.

Pada masa transisi Korpri menghadapi sejumlah tantangan termasuk anggaran namun roda organisasi harus tetap dapat berputar.

“Korpri ini mengalami pasang surut ada yang setuju ada yang tidak. Bagi

Setjen DPR, Korpri penting karena ia melaksanakan fungsi dan peran pembinaan kepegawaian. Namun di tengah dinamika anggota terutama pengurus perlu mengedepankan ketulusan, ikhlas karena tidak ada honor, tunjangan dan sekarang juga tidak didukung anggarannya,” katanya usai membuka Musyawarah Korpri Unit Nasional Setjen DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/15).

Ia juga menyampaikan harapan agar Pengurus Korpri Setjen DPR mampu menyesuaikan diri menghadapi era transisi menjelang pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara. Itulah sebabnya pelaksanaan musyawarah sekaligus memilih pengurus baru untuk periode 2015-2020 menjadi sangat strategis.

Bicara pada kesempatan yang sama Sekjen Dewan Pengurus Korpri Nasional Tasdik Kinanto menekankan salah satu tantangan utama aparatur saat ini adalah menyukseskan reformasi birokrasi. Publik menurutnya sangat menantikan keberhasilan program ini.

“Masyarakat masih melihat banyak penyimpangan yang dilakukan aparat, sementara kita semakin tertinggal jauh dibanding negara lain misalnya Singapura, Malaysia bahkan Vietnam. Level tata kelola pemerintahan mereka sudah jauh lebih baik,” ungkap dia.

Korpri menurutnya harus dapat berperan dalam mengemban misi penting meningkatkan kualitas birokrasi. Dengan diberlakukannya UU ASN maka

kinerja aparat akan dinilai dari kompetensi berbasis merit sistem. Ia juga berharap Musyawarah Korpri Setjen DPR berhasil menetapkan kepengurusan

yang siap menghadapi tantangan lima tahun ke depan. (iky)/foto:andri/parle/iw.

Target Akreditasi RS Masih Terlalu Sedikit



Anggota Komisi IX DPR Ali Mahir

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan pada 2019 ada satu rumah sakit (RS) yang terakreditasi di setiap kabupaten/kota. Target ini dinilai masih terlalu sedikit. Akreditasi ini ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan RS.

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (dapil Jateng II), menilai, mestinya target akreditasi RS bisa lebih dari hanya satu RS di setiap kabupaten/kota. “Menurut saya bila hanya satu RS per kabupaten/kota terakreditasi hingga 2019, berarti hanya 254 RS bertambah, dari sebelumnya 121 RS terakreditasi. Masih sangat jauh dari jumlah RS di seluruh Indonesia sebanyak 2.415 RS,” ujar Mahir saat dihubungi Rabu (13/5).

Ditambahkan Mahir, target ini mesti ditinjau ulang, karena terkait dengan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti diketahui, kini aturan akreditasi tidak hanya bersifat administratif belaka, tapi juga menyangkut mutu layanan. Dalam UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit, akreditasi wajib bagi setiap RS dengan memberi layanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar layanan RS.

“Kita minta Bappenas dan Kemenkes meninjau ulang target ini. Bagaimana kita bisa membangun kualitas bangsa bila target capaian ini dirasa belum optimal. Isu yang terus ramai hari ini tentang kualitas SDM yang pangkal persoalannya adalah kesehatan masyarakat. Bicara kualitas, ya bicara kesehatan,” tegas politisi Partai Nasdem tersebut. (mh) foto: husen/parle/hr

DPR Soroti Program Rehabilitasi 100 Ribu Orang dari BNN

Anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Wenny Haryanto menyoroti program rehabilitasi 100 ribu orang dari BNN. Pasalnya, para pengedar dan pemakai dijadikan satu sehingga Rutan menjadi over kapasitas karena itu perlu dipikirkan solusi terbaik bagi korban narkoba.

“Kita ketahui semua di dalam narkoba ditentukan terbagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu produsen dan pengedar, yang kemudian kalau produsen dan pengedar memang harus dikenakan hukuman ditahan di Lapas (lembaga pemasyarakatan). Sedangkan kalau korban atau pemakai itu ditindaklanjuti dengan rehabilitasi. Namun faktanya bahwa hampir semua dicampur jadi satu yang membuat kapasitas lapas menjadi over kapasitas,” jelasnya.

Oleh karena itu dalam kesempatan itu, Wenny mengingatkan alangkah baiknya kalau tahanan narkoba dari awal sudah dipisahkan. “Bagi korban atau pemakai itu tidak usah di masuk-



Tim Kunker Komisi III DPR mengunjungi Lapas Malut

an ke dalam penjara atau ke dalam lapas, namun diarahkan untuk direhabilitasi di pusat rehabilitasi,” katanya.

Dikaitkan dengan IPWL (Institusi

Penerima Wajib Lapor), lanjutnya, sangat dibutuhkan bagi para korban narkoba yang ingin mendapatkan dukungan moral dari keluarga mereka.

“Kita semua tahu bahwa bagi korban-korban narkoba itu sebetulnya ingin sekali terutamanya keluarganya, bisa direhabilitasi dan ingin dikembalikan lagi ke keluarganya,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, khusus-

nya di Maluku Utara perlu dipikirkan untuk dibuat, persyaratannya 1 dokter, 1 suster, serta 1 psikiater. “Tidak bosan-bosan Saya ingatkan dimana-mana untuk pembentukan IPWL, dan juga perlu diberikan penjelasan kepada ma-

sarakat agar meningkatkan kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan dan Pemda, jadi semuanya bisa teratasi. Dan kita menggunakan kesempatan 100 ribu perbaikan itu,” imbuh Wenny. (as) foto: agung/parle/hr

DPR Dukung Presiden Jokowi Tunjuk Jubir

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai Presiden Jokowi terlihat tidak selalu siap dalam memberikan jawaban terhadap sejumlah isu yang ditanyakan wartawan. Untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dengan publik sudah sepatutnya presiden menunjuk juru bicara (jubir).

“Presiden tidak boleh kebanyakan melayani doorstop interview, hasilnya seperti selama ini beliau terlihat tidak siap. Jawaban yang diberikan tidak menyentuh persoalan secara substansial. Menurut saya Presiden Jokowi sudah harus punya Jubir,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/5/15).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut sebaiknya presiden hanya memberikan penjelasan kepada wartawan pada momen yang telah dipersiapkan dengan baik. Terkait isu terkini yang

sering dipertanyakan wartawan ia menilai sebaiknya diserahkan kepada jubir yang dapat memberikan penjelasan secara tangkas dan sigap.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella menyebut kehadiran jubir kepresidenan diharapkan dapat meredam isu sensitif. Ia juga menyoroti selama ini informasi dari istana muncul di publik berbeda-beda karena tidak keluar dari satu pintu.

Baginya juru bicara bisa diisi kalangan profesional atau kader dari partai politik yang memiliki kemampuan dibidang komunikasi. “Tugas menyampaikan keterangan ini tidak bisa diberikan kepada Sekretaris Kabinet atau Menseskab karena jubir itu memerlukan kepiawaian khusus,” lanjut dia.

Ia secara khusus menyoroti selama



Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya

ini jarang ada keterangan resmi dari Istana usai pertemuan antar negara atau setelah ada keputusan bilateral strategis yang dilakukan pemerintah. Pemberitaan cenderung didominasi agenda pertemuan yang sedang berlangsung saja. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Anggota DPR Usman Jafar Meninggal Dunia



Alm. Usman Jafar

Innalillah wainna ialihii rooji'un.

Telah meninggal dunia anggota DPR Usman Jafar pada hari Jumat (15/5) pukul 06.15 di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Berdasarkan informasi almarhum Usman Jafar meninggal dunia karena sakit jantung dan sudah beberapa saat dirawat di rumah sakit.

Terakhir anggota Dewan dari FPP ini duduk menjadi anggota Komisi VI (bidang industri, perdagangan dan BUMN) dan menjadi anggota DPR sejak 2009 dan terpilih kembali pada pemilu 2014 lalu. Usman Jafar yang juga mantan Gubernur Kalimantan Barat direncanakan akan dimakamkan Sandiego Hill Karawang, se usai solat Jumat.

Politisi Usman Ja'far yang tinggal di Jalan Kelapa Hijau I No. 10 Komplek

Billy Moon, Kalimalang, Jakarta Timur, merupakan mantan gubernur Kalimantan Barat yang menjabat pada periode 2003-2008. Sebelum menjadi seorang gubernur, ia adalah pengusaha bisnis retail yang benar-benar membangun nama dari bawah. Berkat dedikasinya yang tinggi terhadap bidang yang digelutinya, ia pun berhasil berada di puncak karir bisnisnya dan memimpin 12 perusahaan terkemuka milik Abdul Latief.

Kesuksesan tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat di daerah asalnya. Hal ini membuatnya terpilih menjadi anggota DPRD Kalimantan Barat sebelum akhirnya terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Barat periode 2003-2008. (mp)

Pajak Impor Baja Harus Dinaikkan

Impor baja yang masih mendominasi kebutuhan nasional perlu dikurangi. Salah satunya dengan menaikkan pajak impor baja. Dengan begitu, industri baja nasional diberi kesempatan yang luas untuk berkembang memenuhi kebutuhan baja nasional.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir (dapil Sumsel I) kepada Parlemen, baru-baru ini, menegaskan, pemerintah harus memperkuat industri kecil penopang baja di tengah serbuan baja impor. “Pajak impor bahan baku baja harus dinaikkan, karena mematikan industri lokal bahan baku baja seperti pasir besi dan iron or lokal. Apalagi, Cina menjual slab baja dengan harga dumping,” ungkap Hafisz.

Menurut politisi PAN ini, Indonesia sebetulnya memiliki banyak industri penopang baja. Namun, kebanyakan mati, karena industri besar lebih memilih produk Cina yang murah. Peme-



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

rintah, kata Hafisz, wajib memberi perlindungan kepada industri kecil baja. Sampai kini, pemerintah belum optimal memperkuat industri baja nasional untuk memenuhi kebutuhan di

dalam negeri. Padahal, saat yang sama pemerintah ingin menaikkan devisa dan sedang membangun infrastruktur.

“Jika pemerintah ingin memperkuat baja nasional sekaligus memperkuat devisa, maka industri kecil harus ditumbuhkan dengan cara memberi kesempatan untuk menjadi *supporting* bahan baku baja nasional dengan menaikkan pajak bahan baku dari luar negeri,” papar Hafisz.

Sementara itu, Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISI) merilis konsumsi baja nasional yang mencapai 49,6 kg per kapita pada 2015. Kebutuhan baja per tahunnya sendiri sudah mencapai 13,8 juta ton. Diperkirakan 55 persennya diambil dari produk impor. Lima tahun mendatang, konsumsi baja per tahun per kapita meningkat 100 kg dengan kebutuhan baja mencapai 26,2 juta ton. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

Revisi UU Pilkada Hindari Kegaduhan Politik



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman dalam acara Forum Legislasi

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menegaskan semua fraksi di DPR sudah menandatangani kesepakatan untuk melakukan revisi terbatas

UU Pilkada. Ini penting agar tercipta pilkada serentak yang damai sekaligus menghindari kegaduhan politik yang bisa terjadi pada Desember 2015.

Karena itu, katanya, sebagai dasar hukumnya agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak melanggar UU, maka dibentuk Panja Komisi II DPR untuk merevisi UU Pilkada tersebut.

Tiga rekomendasi Komisi II DPR RI yang diakomodir PKPU hanya mengenai keputusan keputusan hukum tetap atau inkrah dan islah. Sedangkan keputusan pengadilan terakhir atau PTUN tidak diakomodir PKPU.

“Padahal ini bisa menimbulkan kegaduhan politik. Untuk itu, Panja DPR sepakat melakukan revisi terbatas. Ini bukan hanya untuk kepentingan Golkar dan PPP, melainkan untuk proses seluruh pilkada,” ujar Rambe dalam acara forum legislasi ‘Revisi UU Pilkada dan Parpol’ bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, Kapuspen Kemendagri Dodi Riatmadji, dan direktur eksekutif PollCoMM Heri Budianto di Gedung DPR Jakarta, Selasa (12/5).

Khusus mengenai parpol yang sedang konflik, Panja memutuskan 3 opsi; yaitu menunggu putusan hukum

tetap atau inkraht, melakukan Islah, dan berdasarkan keputusan pengadilan terakhir. Tapi, yang ketiga ini yang tidak diakomodasi oleh PKPU dengan alasan tidak ada payung hukumnya. Karena itu, Panja Komisi II DPR mengusulkan revisi sebagai dasar hukumnya.

“Itu tidak menyalahi proses pembentukan perundang-undangan. Jadi, bukan untuk melanggar UU dan revisi itu akan selesai pada Juni sebelum pendaftaran Pilkada dimulai,” ujar Rambe.

Perselisihan parpol pun, kata Rambe, bisa terjadi kalau sebanyak dua pertiga peserta Munas Golkar menolak. “Di Golkar tak ada perselisihan. Jadi, yang akan diselesaikan oleh Mahkamah Partai (MP) Golkar itu? Juga tidak membuat satu keputusan seperti amanat Pasal 33 UU No 8 tahun 2011 tentang Parpol, maka Komisi II DPR merekomendasikan tiga hal tersebut ke PKPU,” tambahnya.

Sementara itu, Kapuspen Kemendagri Dodi Riatmadji, mengakui

jika UU Pilkada ini merupakan UU yang prosesnya paling panjang dan rumit. Namun, revisi UU Pilkada ini bukan sesuatu yang tabu, karena prosesnya memang berliku-liku sehingga perlu disempurnakan karena berpotensi untuk digugat ke MK.

“Tapi, kuncinya tetap ada di Presiden Jokowi. Karena Kemendagri harus lapor kepada Presiden tentang revisi tersebut,” katanya. (nt/sc)/foto:andri/parle/iw

Kemenag Didesak Segera Urus Penerbitan Keppres BPIH

Komisi VIII mendesak kementerian agama untuk segera mengurus penerbitan keppres BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji). Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay kepada Parlemen, baru-baru ini.

Dijelaskannya Keppres tersebut sangat diperlukan agar para calon jamaah haji bisa segera melunasi BPIH mereka. Semakin cepat Keppres dikeluarkan, semakin banyak waktu yang tersedia bagi para calon jamaah haji untuk melunasinya.

“Pada saat penetapan BPIH, salah satu catatan dan rekomendasi komisi VIII adalah mendesak kementerian agama untuk segera mengurus keppres tersebut. Waktu itu, menteri agama menyanggupinya,” ungkap Saleh.

Keppres itu diyakininya penting dalam membantu kerja kementerian agama dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Setidaknya, kementerian agama memiliki waktu yang cukup untuk mendata dan mengurus seluruh keperluan para jamaah.

Hal itu juga sejalan dengan semangat dan komitmen kementerian agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia di tahun ini.

Diungkapkan Saleh, tahun lalu DPR mencatat bahwa keppres agak sedikit terlambat dikeluarkan. Akibatnya, ada saja persoalan administratif yang terkendala. Untuk tahun ini, ia berharap hal itu tidak terulang lagi.”

Kami meyakini bahwa menteri agama bisa segera mendesak istana untuk segera menerbitkan keppres tersebut. Apalagi, menteri agama sendiri pernah menyatakan bahwa keppres itu akan dikeluarkan secepatnya. Bahkan menteri



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

agama sempat berharap Keppres itu akan diterbitkan seminggu setelah BPIH ditetapkan.

“Besok itu sudah seminggu. Mestinya, keppres itu sudah keluar. Tetapi kita tunggu saja sampai hari Senin (4/5). Mudah-mudahan, minggu depan keppresnya sudah keluar,” harap politisi dari Fraksi PAN, Dapil Sumut II itu. (Ayu) foto: dok/parle/hr

Revisi Perpres BPJS Kesehatan Perlu Disambut Baik

Usulan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan yang selama ini belum mewajibkan rumah sakit (RS) swasta berkerja sama dengan BPJS Kese-

hatan, disambut baik. Kelak, semua RS, baik milik pemerintah atau swasta harus bekerja sama dengan BPJS.

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (dapil Jateng II) saat dihubungi baru-

baru ini menyatakan, perlu ada pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban RS swasta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Menurut Mahir, RS swasta selama ini membiaya sendiri



Anggota Komisi IX DPR Ali Mahir (tengah)

operasionalnya, baik fasilitas kesehatan, gedung, dan tenaga kesehatan.

“Kita setuju perlu segera ada pengaturan keikutsertaan RS swasta dalam program BPJS Kesehatan dengan merevisi aturan yang ada,” kata Mahir. Sebelumnya otoritas BPJS Kesehatan mengeluhkan rendahnya

partisipasi RS swasta dalam program BPJS Kesehatan. Dampaknya, banyak penumpukan pasien di beberapa RS pemerintah. Dari 2.400 RS di seluruh Indonesia, baru 1.800 RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, masih ada 600 RS swasta yang belum bekerja sama.

“Kita akan minta laporan dari pemerintah sejauh mana upaya yang telah dibangun dengan RS swasta tentang program BPJS Kesehatan,” ungkap politisi Partai Nasdem itu, seraya menambahkan, “Saya yakin Kemenkes telah membangun komunikasi dengan RS swasta dan kita sangat mengharapkan layanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal lagi.”

Mahir menambahkan, Komisi IX akan terus mengavaluasi dan mengawasi pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat tersebut. Dia juga menyampaikan dukungannya kepada pemerintah atas program layanan kesehatan ini.

Apalagi, Presiden Joko Widodo saat membagikan Kartu Indonesia Sehat di Sumut, menyerukan agar otoritas kesehatan memberi sanksi kepada RS swasta yang tidak mau membangun kerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Saya optimis program ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” imbuhnya, menutup perbincangan dengan Parleментарia. (mh) foto: andri/parle/hr

Disambut Baik Pengiriman Tenaga Medis ke Daerah

Pengiriman para tenaga medis ke daerah oleh Kemenkes disambut baik. Para tenaga medis tersebut akan dikirim ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Tahap pertama pengiriman sebanyak 143 tenaga medis dari berbagai latar keahlian untuk ditempatkan di 120 puskesmas di 48 kabupaten.

Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan (dapil Jatim IV) mengapresiasi program pengiriman tersebut. Dia berharap agar mereka yang dikirim ke DTPK mendapat penghasilan yang layak selama bekerja. “Ini program yang bagus. Namun, perlu dipikirkan apakah para petugas medis itu sudah mendapat imbalan yang layak atas tugasnya di daerah.”

Ditambahkan politisi Partai Demokrat tersebut, 120 Puskesmas yang nanti akan menampung para tenaga medis baru itu, perlu pula dilengkapi sarana dan prasarananya termasuk obat-obatan. “Kita ketahui puskesmas harusnya bisa menangani 154 jenis penyakit. Dengan demikian program rujukan berjenjang akan berjalan lancar dan RSUD tidak menjadi puskesmas raksasa,” katanya saat dihubungi Parleментарia belum lama ini.



Anggota Komisi IX DPR Ayub Khan

Sebelumnya pemerintah sendiri sudah mencanangkan program Nusantara Sehat. Ada 960 tenaga medis yang rencananya akan dikirim. tahap pertama baru mengirim 143 yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan ahli laboratorium medik. Mereka dikirim selama dua tahun sesuai kontrak ke beberapa DTPK seperti Aceh, Papua, Bengkulu, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

Indonesia Dorong Kesetaraan Gender di ASEAN

Anggota DPR Amelia Anggraini dari Fraksi Partai Nasdem menghadiri ASEAN People's Forum Meets AIPA yang diselenggarakan pada tanggal 25 April lalu di Kuala Lumpur – Malaysia. ASEAN People's Forum meet AIPA dilaksanakan di sela-sela rangkaian sidang KTT ASEAN ke-26 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan dihadiri oleh sekitar 20 orang dari Parlemen Anggota AIPA dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di negara-negara ASEAN.

Menurut anggota Komisi IX (bidang naker dan kesehatan) ini, pertemuan tersebut merupakan gagasan Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) bekerja sama dengan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dengan tujuan menelaah pengaruh integrasi ASEAN terhadap masyarakat marjinal.

Khususnya kaum perempuan dan memastikan jaminan terhadap hak-hak perempuan dalam implementasi Komunitas ASEAN. Selain itu, pertemuan juga dimaksudkan untuk membangun keselarasan antara masyarakat sipil dan anggota parlemen demi mening-

katkan pembangunan yang berkeadilan dalam merespon berbagai agenda paska 2015, baik di tingkat ASEAN maupun global.

Dijelaskan, pertemuan terdiri dari dua sesi, yaitu panel *Defining a Progressive and People-Centred Asean, thematic presentation* dan panel dua terdiri *Asean development challenges and opportunities- Strengthening integration, implementation and review for sustainable Development in Asean*.

Selain dua sesi panel diskusi tersebut juga diadakan sesi *Country Presentation* dimana perwakilan LSM menyampaikan presentasi mengenai isu-isu utama tentang wanita yang memiliki pengaruh di tingkat nasional. Dalam presentasi tersebut juga disampaikan permasalahan tentang bagaimana peran masyarakat sipil, anggota parlemen dan pemerintah untuk dapat berkolaborasi guna lebih mempromosikan dan mendukung hak hak perempuan dan kesetaraan gender di semua negara di kawasan ASEAN.

Menanggapi *Country Presentation* ini, Indonesia menyampaikan pan-



Anggota DPR Amelia Anggraini

dangan-pandangannya menyangkut bagaimana masyarakat sipil dan para anggota parlemen dapat berkolaborasi untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di seluruh di wilayah ASEAN.

Dalam bidang politik, lanjut Amelia, para anggota parlemen dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama dalam upaya pemberdayaan perempuan serta diperlukannya jaringan antar organisasi perempuan untuk mendukung perempuan dalam partisipasi politik. Hal ini penting mengingat partisipasi perempuan yang setara dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan merupakan hak fundamental. (mp,bksap) foto: naefuroji/parle/hr

DPR Minta Pemerintah Buka Kran Impor Kebutuhan Pokok di Kepri



Tim Kunker Komisi VI DPR saat pertemuan dengan Gubernur Kepri

Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan agar membuka kran impor kebutuhan pokok, khususnya komoditas beras di daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Mengingat, daerah perbatasan sangat rawan terhadap penyelundupan.

“Ini sudah berkali-kali kami sampaikan agar Mendag membuka kran impor beras. Di daerah perbatasan seperti di Kepri tidak ada hasil apapun, tidak ada yang menanam (padi),” kata Nyat Kadir usai melakukan kunjungan kerja Komisi VI DPR di Kabupaten Karimun, Kepri, baru-baru ini.

Politisi F-Nasdem ini menegaskan,



larangan impor beras di daerah perbatasan sangat rentan terjadinya tindak pidana penyelundupan impor akibat tingginya disparitas harga beras dari Jawa atau Sumatera terhadap beras impor.

“Daerah perbatasan sangat berbahaya dan rentan terhadap penyelundupan. Kalau tidak impor, maka yang ilegal tetap jalan. Artinya sama saja membiarkan yang ilegal menjadi legal, sementara aparat sudah berusaha, tapi kemampuannya kan terbatas dengan daerahnya yang begitu luas,” tegasnya.

Hasil temuan Politisi yang memang

berasal dari Dapil Kepri ini menunjukkan adanya disparitas harga beras impor dibanding beras lokal. Bahkan, banyak toko yang menjual beras impor. Harga beras dalam negeri, bisa menembus Rp11.000 per kilogram di Kabupaten Natuna dan Lingga.

“Harga setinggi itu, kata dia lagi, cukup membebani masyarakat. Kecuali harganya bisa Rp 8.000, tidak masalah kran beras impor ditutup,” kritiknya.

Politisi yang pernah menjabat Wali Kota Batam ini berjanji akan memperjuangkan agar kran impor beras di Kepri dibuka. Ia juga akan berkoordinasi dengan Bulog.

Senada dengan Nyat Kadir, Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir menyatakan memang semestinya tidak ada batasan barang kebutuhan masuk. Ia berjanji akan membawa persoalan ini ke pusat.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Muhammad Sani meminta kepada Pemerintah untuk membuka kran impor kebutuhan pokok di Kepri, karena berada di daerah perbatasan.

“Masa daerah kita menyandang FTZ, tapi tetap saja ada batasan akan persoalan memasukkan barang kebutuhan,” curhat Sani. (sf) foto: sofyan/parle/hr

Legislator Apresiasi Peresmian IPC Corporate University



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena

Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena memberikan apresiasinya kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), atas diresmikannya IPC Corporate University di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kampus ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dengan didampingi sejumlah pejabat tinggi RI.

“Kami salut dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya, dimana Pelindo dapat memberikan suasana yang baru, karena sampai saat ini belum ada universitas yang spesifikasinya seperti IPC Corporate University ini. Bahkan katanya, hanya ada satu-satunya di Indonesia,” kata Michael, usai acara, Selasa (5/05).

Politisi F-Demokrat ini menilai kampus ini sangat spesifik, karena orientasinya untuk *shipping*, *cargo*, dan transportasi. Sehingga nantinya di kampus ini akan dilatih sumber daya manusia yang siap pakai.

“Kampus ini berbeda dengan universitas umum lainnya, karena dibekali dengan sarana dan prasarana yang sangat komplit, sehingga lulusannya ini betul-betul dapat digunakan dan dipakai oleh masyarakat yang terlibat dalam *shipping*, *cargo*, dan transportasi. Universitas ini akan kompetitif, sehingga mampu berhadapan dengan pangsa pasar,” salut Michael.

Politisi asal Dapil Papua Barat ini

yakin, dengan adanya universitas ini, akan mempermudah persiapan SDM siap pakai, bila disinergikan dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi terkait tol laut.

“Bagaimana kebijakan tol laut ini dapat berjalan, tapi tidak memiliki sumber daya manusia, jika dikaitkan dengan pelabuhan dan kemaritiman yang cukup tangguh. Sementara inilah (IPC Corporate University), jawaban dari kebijakan-kebijakan yang ada,” imbuh Michael.

Direktur Utama Pelindo II R.J Lino menyatakan bahwa saat ini pemerintah kian giat menggalakkan pembangunan pelabuhan di berbagai kota di Indonesia. Selain pembangunan *hard* infrastruktur pelabuhan di Indonesia, juga perlu dibarengi pembangunan *soft* infrastruktur, dalam hal ini SDM yang kompeten dan profesional.

“Inilah bentuk dukungan kami kepada Pemerintah yang memiliki perhatian khusus di bidang kemaritiman. Kami menargetkan IPC Corporate University dapat menyediakan berbagai program dan fasilitas dengan level setaraf lembaga pelatihan dan pendidikan kemaritiman lainnya di dunia,” jelas Lino.

Sebagaimana diketahui, IPC Corporate University merupakan salah satu anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II yang didirikan dengan tujuan menjadi pusat pengetahuan bidang kepelabuhan, maritim, dan logistik.



Program yang ditawarkan berorientasi pada bidang *Container Terminal*, *Non Container Terminal*, *Marine Service* dan Logistik.

Kampus ini terdiri dari enam bangunan, yakni gedung *classroom*, *ware-*

house simulation, *Ballroom*, *Residence*, *Simulator*, dan *Administration Building*. IPC Corporate University juga bekerjasama dengan beberapa universitas nasional dan internasional, yakni, IMD Business School, STC-BV, Kuhne Logis-

tic University, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Sriwijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin. (sf, and) foto: andri/parle/hr

Pengadaan Kapal Mendesak Untuk Indonesia Timur

Pengadaan kapal pengangkut barang dan penumpang sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjangkau wilayah di Indonesia bagian timur. Dengan kapal-kapal yang memadai distribusi kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat di wilayah timur semakin lancar.

Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI Peggi Patricia Pattipi (dapil Papua) di Manado, usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke Sulawesi Utara (Sulut), baru-baru ini. Menurut Peggi, pelabuhan dan jalan di Manado perlu digenot terus pembangunannya, karena berdampak pada distribusi barang ke pulau-pulau terdekat, seperti

Maluku dan Papua. Ia menilai positif pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan Pemprov Sulut.

“Saya lihat di Manado kebutuhan infrastruktur jalan terutama yang menuju pelabuhan sangat penting dibangun. Ini berdampak pada *suplay* kebutuhan pokok seperti sayuran dan buah-buahan ke Papua,” ujar politisi PKB tersebut. Dengan pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan, tentu semakin memudahkan masyarakat mendapat akses transportasi yang baik.

Peggi menambahkan, di pulau-pulau kecil di sekitar Sulut ternyata ada yang dihuni penduduk. Tentu mereka membutuhkan transportasi laut yang me-



Anggota Komisi V DPR Peggi Patricia Pattipi

madai untuk menyebrang antarpulau. Pengadaan kapal dan pelabuhannya tentu menjadi keniscayaan. “Saya dukung pemerintah daerah yang ingin bangun pelabuhan di pulau-pulau kecil itu agar infrastuktur bisa lebih baik lagi. Pengadaan kapal juga perlu untuk rakyat di Indonesia timur.” (mh) foto: husen/parle/hr

Komisi VI DPR Segera Bentuk Panja Batam

Komisi VI DPR akan segera membentuk panja percepatan pembangunan Batam. Dengan pembentukan panja ini diharapkan segala permasalahan yang menghambat pembangunan Batam dapat segera diselesaikan. Demikian disampaikan Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), di sela-sela kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau, belum lama ini.

“Terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan *transshipment* peti kemas Tanjung Sauh, Komisi VI DPR RI, setelah kunjungan kerja ini, rencananya akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Khusus Batam. Panja ini untuk mendukung pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam,” Hafisz.

Politisi asal Dapil Sumatera Selatan I ini menyatakan, pihaknya akan membahas mengenai pembentukan Panja Batam ini dengan Komisi-komisi lain di DPR.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Irmadi Lubis (F-PDI Perjuangan), menyatakan bahwa DPR perlu turun tangan untuk mengatasi masalah pembangunan Batam. Permasalahan tersebut tidak hanya terbatas masalah pembebasan lahan, namun juga hal lain yang bersifat lintas sektoral.

“Saya kira permasalahan pembangunan pelabuhan Tanjung Sauh dan juga Batam secara keseluruhan harus



Pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan BP Batam

memperoleh perhatian serius. Permasalahan tersebut harus dipecahkan secara lintas sektoral. Saya kira kita dapat membentuk panja khusus Batam untuk mempercepat penyelesaian masalah ini,” tegas Politisi asal Dapil Sumut I ini.



Seluruh Anggota Tim Kunker Komisi VI DPR mengusulkan Anggota Komisi VI Nyat Kadir untuk menjadi Ketua Panja. Ketika Parlemen bertanya hal ini kepada politisi Nasdem ini, ia menyatakan siap. Mengingat Provinsi Kepri merupakan daerah pemilihannya. Sementara itu, saat pertemuan

dengan Kepala BP Batam Mustofa Wijaya dan jajaran, di *Marketing Centre, Batam Centre, Senin (27/04/15)*, Mustofa menjelaskan bahwa permasalahan terkait pengembangan Batam adalah pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan baru, Tanjung Sauh.

“Kami berencana membangun pe-

labuhan baru di daerah Tanjung Sauh. Namun saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Untuk tahap pertama kami butuh tanah seluas 639 hektar, namun baru kurang dari 10 persen luas lahan yang dibebaskan,” jelas Mustofa. (sf) foto: sofyan/parle/hr

Infrastruktur Sulut Semakin Membaik



Tim Kunker Komisi V DPR saat meninjau infrastruktur jalan di Manado

Infrastruktur di Sulawesi Utara (Sulut), kini terlihat semakin membaik. Tidak saja membangun jalan baru, tapi juga jembatan dan pelabuhan dibangun bersamaan. Ini tentu berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat setempat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso

(Jabar I), belum lama ini di Manado saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V ke Sulut. “Secara garis besar pembangunan di sini sudah bagus. Banyak peningkatan infrastruktur di Sulut. Banyak pula anggaran APBN yang dibawa ke Sulut ini,” ungkap Anggota F-PD itu.

Kalau pun ada sedikit kendala di

lapangan, itu hanya pembebasan lahan yang belum rampung. Pemerintah Sulut, nilai Agung, juga sudah cukup tanggap memberi perhatian pada kebutuhan infrastrukturnya. Apalagi, Sulut merupakan wilayah kepulauan yang bagian utaranya berbatasan langsung dengan negara Filipina.

Anggaran dan perhatian ke Sulut, memang, seiring dengan program pemerintah pusat yang ingin menggalakkan pembangunan ke wilayah timur Indonesia. Di pulau Sangihe, lanjut Agung, pulau paling utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina, terus membaik kondisinya. Ekonomi warga setempat kian maju seiring perbaikan infrastruktur di sana.

Sementara itu berbicara soal rencana pembangunan bandara perintis untuk menjembatani transportasi antarpulau di Sulut, Agung memandang perlu pembangunan tersebut. Pembangunan bandara perintis itu konteksnya untuk memperkuat NKRI. Di Sangihe perlu dibangun bandara perintis agar masyarakat betul-betul terlayani dengan baik.

“Kita bicara untuk kesatuan NKRI. Semua harus dipikirkan. Pemerintah harus berperan. Penerbangan perintis mungkin tidak membawa profit. Tapi, tetap harus ada di situ untuk melindungi dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus hadir di situ, tandas Agung lebih lanjut. (mh)

foto: husen/parle/hr

Markas Brimob di Buton Perlu Segera Dibangun

Kapolda Sultra Brigjen Pol Arkian Lubis mengapresiasi atas kunjungan Komisi III DPR RI, di Mapolda Sultra, belum lama ini. “Kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi daerah, tidak lain untuk menyatukan persepsi dan pendapat dalam meningkatkan pembangunan provinsi Sultra, ung-

kapnya.

Brigjen Pol Arkian Lubis berharap agar Komisi III DPR bisa membantu mewujudkan pembangunan markas Detasement Brimob di Buton Sultra.

“Markas Detasement Brimob di Buton sangat dibutuhkan, tujuannya untuk meningkatkan ketahanan teritorial

di kawasan perairan Buton dan sekitarnya,” terang Arkian Lubis.

“Kami sudah mendengar berbagai usulan dari mitra kerja Komisi III DPR di Provinsi Sultra. Seperti Kapolda Sultra mengusulkan pembangunan markas Detasement Brimob di Buton. Selain itu Kejati mengusulkan pembangunan



Tim Kunker Komisi III DPR di kantor Mapolda Sultra

kantor dan institusi lain mengusul pendanaan anggaran,” ungkap Mulfachri. Semua program yang diusulkan itu, tuturnya, akan menjadi kajian di

internal Komisi III DPR, untuk diusulkan ke Pemerintah selaku pengambil kebijakan.

“Pembangunan Detasement Brimob di Buton Sultra merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan pantas untuk segera diakomidir,” terang Mulfachri.

Buton secara geografis terpisah dari daratan Sultra sehingga diperlukan satuan Brimob ada disana, mungkin Pol Air yang komplit perlu ada agar tupoksi Kepolisian dapat berjalan optimal di Buton. Mulfachri Harahap menyatakan bahwa permintaan dari Polda Sultra terkait usulan pembangunan markas Brimob di Buton, serta sejumlah usulan dari instansi terkait yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR akan disampaikan kepada mitra kerja di Jakarta saat raker nanti. (skr) foto: singgih/parle/hr

Konflik Tanah di Propinsi Riau Masih Marak



Tim Kunker Komisi II DPR saat berdiskusi dengan jajaran BPN Provinsi Riau

Maraknya kasus pertanahan di Propinsi Riau yang berupa sengketa, dan konflik serta yang berperkara dipengadilan masih memprihatinkan, pasalnya, masih banyak kasus yang belum terselesaikan baik melalui jalur mediasi maupun hukum.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria pada saat melakukan pertemuan dengan

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau di Kantor BPN Pekanbaru Riau, belum lama ini.

Ahmad Riza Patria mengemukakan, bahwa persoalan pertanahan di Indonesia khususnya di Pekanbaru Riau masih pelik. Seperti persoalan antara masyarakat itu sendiri dengan Perhutani, masyarakat dengan pihak swasta perkebunan, pertambangan

maupun antara masyarakat dengan pemerintah daerah, juga antar masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

“Saya berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mempunyai komitmen yang besar terhadap masyarakat kecil khususnya, terkait persoalan tanah dimana harusnya sudah mulai diurai dan diharapkan selama pemerintahan ini bisa ada perubahan yang signifikan,” ujarnya.

Menurut Riza, tanah ini merupakan sebuah aset yang paling penting bagi seseorang, bagi keluarga. Artinya jangan sampai yang memiliki hak yang sesungguhnya dirampas, direbut, dan dirampok oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab. “Disitulah pentingnya kehadiran negara sesuai dengan semboyan nawacita di tengah-tengah masyarakat untuk menyelamatkan hak masyarakat atas tanah mereka,” tegas Riza.

Dia berkeyakinan dengan kebijakan Menteri agraria ini bisa menyelesaikan berbagai kasus-kasus tanah, walaupun banyak hambatan dilapangan karena ada saja oknum aparat BPN, Kepolisian, dan aparat pemerintah yang memang tidak berpihak kepada masyarakat kecil justru mereka berpihak kepada pihak-pihak swasta pemilik modal yang lebih besar.

Maka dari itu, lanjutnya, sudah saatnya pemerintah tidak lagi berpihak kepada orang-orang yang bermodal



besar, akan tetapi pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat lemah dan kecil, miskin dan memang tidak memiliki apa-apa.

“Kedepan memang harus sudah dilakukan pembenahan secara menyeluruh, seperti pengukuran dan pembuatan akte tanah, tentunya harus ada pemetaan serta dengan adanya

tata ruang yang akan menjadi satu kesatuan Agraria dengan BPN dan mudah-mudahan masalah seperti ini dapat terkoordinir dan terorganisasi serta terkomunikasikan dengan baik dan tidak tumpang tindih lagi,” jelasnya.

Dia mencontohkan banyak kasus tanah yang tidak sesuai lagi dengan

faktanya, seperti dalam surat satu hektar, namun di lapangan tidak ada satu hektar, dan sebaliknya dalam surat hanya satu hektar tapi di lapangan lebih dari satu hektar. “Hal ini masih banyak kasus yang seperti ini, maka kasus-kasus yang seperti ini ke depan harus dibenahi,” tegas Riza.

(Spy) foto: supri/parle/hr

Penerapan UU Mata Uang di Kalbar Relatif Terbatas

Sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang sudah diundangkan pada tahun 2011 ini masih relatif terbatas di Kalimantan Barat (Kalbar). Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI G. Michael Jeno dari F-PDIP disela-sela kunker ke Kalbar baru-baru ini.

“Masyarakat di Kalbar masih belum tahu tentang hal-hal seperti ini, apalagi masyarakat yang berada di perbatasan langsung dengan Sarawak, mereka sangat familiar dengan mata uang Ringgit,” jelas Michael.

Oleh karenanya, sambung Michael, ini menjadi tugas dari Komisi XI DPR RI untuk mensosialisasikan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini, terutama masyarakat perbatasan yang transaksi ekonominya masih menggunakan mata uang Ringgit.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, tujuan pembentukan UU ini

adalah untuk menegaskan Rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia beserta seluruh informasi tentang fisik dan penggunaan serta sanksi terhadap penyelewengan, penyalahgunaan Rupiah dalam transaksi bisnis dan pembayaran di Republik Indonesia.

la membenarkan, di perbatasan pemberlakuan transaksi 600 Ringgit per KK masih terjadi selama belum adanya aturan baru, di luar itu mereka menggunakan mata uang Rupiah.

Jadi sebenarnya di Kalbar tidak ada isu yang terlalu menonjol mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bahkan selama ini di perbatasan ternyata tedensi untuk pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Mata Uang ini relatif tidak ada.

“Tetapi kita harus mensikapi sosialisasi mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ini yang masih relatif terbatas di Kalbar,” kata Michael se-



Anggota Komisi XI DPR G. Michael Jeno

raya menambahkan pihaknya tidak mau mendengar adanya pelanggaran Undang-Undang tentang Mata Uang ini. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Bangun Mentawai Butuh Aparat Pejuang dan Dukungan Pusat

Anggota Komisi IV DPR, Hermanto berpendapat untuk membangun Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat membutuhkan aparat pemerintah yang bermental pejuang.

“Aparatur yang punya komitmen dan sanggup bersabar dalam membina dan membangun masyarakat,” ucapnya usai mengunjungi Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pulau Sipora merupakan salahsatu tempat yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan Sum-

bar 2-10 Mei pekan lalu.

Pembangunan suatu daerah, lanjutnya, harus diawali dan disertai pembangunan masyarakatnya. “Keberhasilan pembangunan suatu daerah tergantung dari keberhasilan pembangunan masyarakatnya,” katanya.

Di pulau tersebut, Hermanto mengadakan dialog dengan jajaran Pemerintah di Kantor Bupati setempat dilanjutkan turun ke lapangan bertemu dengan tokoh masyarakat dan kelompok tani.

Tuti, salah satu tokoh di Desa Si-

pora Jaya Kecamatan Sipora Utara menyarankan agar program bantuan untuk masyarakat harus diawali dan disertai dengan pembinaan. “Yang terjadi disini, orang dibantu tapi tidak didampingi dalam pengelolaannya. Akibatnya, bantuan tersebut habis dalam waktu singkat,” ungkapnya.

“Contohnya bantuan sapi. Hari ini diberi, besoknya sudah jadi uang. Tidak akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang”, tambahnya.



Anggota Komisi IV DPR Hermanto

Harapan pendampingan oleh aparat yang kompeten dinantikan juga oleh Wastam, Ketua kelompok tani Tunas

Baru, Desa Sido Makmur. “Kami sudah siapkan sepetak sawah untuk demplot tanaman padi agar dikelola oleh penyuluh. Maksudnya kalau demplot itu hasilnya baik, kami bisa menirunya,” paparnya.

“Tetapi yang terjadi penyuluh tidak datang-datang,” tambahnya. Novriadi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perikanan dan Perkebunan setempat yang ikut dalam rombongan menyebutkan, penyuluh yang bertugas disini hanya satu orang menangani 4 desa dan tidak dibekali alat transportasi. “Kebetulan penyuluh yang dimaksud tersebut sudah pensiun,” ungkapnya.

Bupati Mentawai Yudas Sibagalet juga mengeluhkan perilaku penyuluh. “Penyuluh itu kalau sudah jadi PNS pengennya pindah ke tempat lain,”

keluhnya.

Hermanto meminta Pemerintah Pusat membantu menangani hal ini dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai. “Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai sangat tertinggal dibandingkan daerah lain. Jalan hotmik hanya ada pada poros jalan utama saja. Itupun tidak panjang,” ungkapnya.

Alat transportasi yang cocok untuk aparat penyuluh adalah sepeda motor untuk di darat dan *speedboat* untuk menjangkau antar pulau. “Jalan yang bagus, pendek. Sepeda motor minim. *Speedboat* tidak ada. Bagaimana aparat mau betah,” pungkasnya. (*,mp) foto:ry/parle/iw

Pertumbuhan Ekonomi NTT Perlu Terobosan

Kawasan Indonesia Timur termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagian besar merupakan daerah miskin. Kalau pertumbuhan ekonominya hanya 4% setiap tahunnya atau hampir sama dengan pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional, berarti tidak bisa mengejar ketertinggalan.

“Saat ini NTT tengah didorong pertumbuhan ekonominya untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan kawasan lain di Indonesia,” ungkap anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetya di sela-sela kunker ke NTT baru-baru ini.

Untuk bisa mengejar ketertinggalan, sambungnya, maka pertumbuhan ekonominya harus dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah harus dilakukan terobosan-terobosan, misalnya bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa dua kali lipat rata-rata ekonomi nasional.

“NTT harus dapat mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara Darwin-NTT-Dili dan mengembangkan klaster regional yang disebut dengan Sunda Kecil (NTT-NTB-Bali),” kata Andreas seraya menambahkan, apa yang dihasilkan dan menjadi kekuatan NTT dan Bali itu saling mengisi dan saling sinergi.

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, harus ada sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak perbankan dalam lembaga keuangan. Karena daerah miskin, ternyata penyerapan dana yang digunakan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi 30%-nya dari dana yang dihimpun. Ibaratnya NTT yang sudah miskin ini malah menyumbang ke daerah lain.

Memang karakteristik NTT ini seperti juga provinsi kepulauan, dimana luas wilayah daratan 4.734.990 Ha dan luas wilayah lautan 15.141.773,10 Ha yang tersebar pada 1.192 pulau. 44 pulau yang dihuni, 1.148 pulau belum dihuni, 246 pulau sudah bernama dan 946 lainnya belum bernama. “Jadi luas lautannya lebih besar dari luar daratan,” kata Andreas.



Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetya

Dari segi keadilan, maka perlu formula baru dalam menentukan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk itulah, kata Andreas, memang harus segera dilakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Ia kembali menekankan, pertumbuhan ekonomi NTT bisa dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan harus jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. “Dengan demikian, NTT bisa mengejar ketertinggalan dibandingkan kawasan lain di Indonesia,” pungkasnya. (iw)/foto:iwan armianas/parle/iw.



Segera Cari Solusi 70% Atlet Jatim Teindikasi Gagal Ginjal



Tim Kunker Komisi X DPR dengan Gubernur Jatim

Komisi X DPR mendesak pemerintah untuk secepatnya mencari solusi atas adanya indikasi sebanyak 70 persen atlet di Jawa Timur akan terkena gagal ginjal. Kalau dalam pembinaan atlet ternyata akan berdampak penyakit membahayakan itu maka harus diperbaiki sekarang juga, jangan sampai terlambat.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya dan anggota Jefirtson R. Riwu Kore usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangkaian kunjungan kerja, pekan lalu di Surabaya.

Gubernur Soekarwo yang didampingi para pejabat Pemprov termasuk

Kepala Koni Jatim mengemukakan bahwa sebanyak 70% atlet di Jawa Timur terancam gagal ginjal. Ancaman penyakit ini diindikasikan lantaran pola makan, asupan gizi tidak seimbang pembinaan fisik yang dijalani.

“Kalau memang benar para atlet akan terancam gagal ginjal maka harus diperbaiki sekarang juga. Jangan sampai terlambat sebab akan merugikan para atlet dan akhirnya tidak akan bisa berprestasi maksimal,” tandas jelas Jefirtson.

Atas kasus tersebut, politisi Partai Demokrat ini mendesak agar kasus ini betul-betul diteliti dan diperbaiki apakah benar para atlet akan kena

ancaman penyakit membahayakan tersebut dan harus segera dicari solusinya. Angka 70 persen, tegas dia, merupakan jumlah yang cukup besar dan perlu segera dicari jalan keluarnya.

Ketua Komisi X Teuku Riefky menambahkan, ancaman gagal ginjal sangat mungkin terjadi kepada atlet-atlet dari daerah lain bahkan secara nasional tidak hanya dari Jawa Timur. Kemungkinan, karena tidak terpolanya asupan gizi dan pola latihan yang tidak seimbang sehingga fungsi ginjal melebihi kapasitasnya.

Komisi X akan meneruskan permintaan Koni Jatim tersebut kepada Menpora pada masa persidangan pekan depan (Minggu III Mei), dengan berharap ada suatu mekanisme antisipasi termasuk sinergitas Menpora dan Kemenkes. “Masa sidang mendatang akan kami bahas dengan Kemenpora termasuk isu-isu yang berkembang pada saat Komisi X kunker ke tiga Provinsi yakni Papua, Kalsel dan Jatim,” tambah kader muda PD tersebut.

Masalah lain yang akan dibahas adalah soal keluhan perpindahan atlet menjelang PON, karena ada daerah dengan susah payah melakukan pembinaan, tetapi dibajak daerah lain, padahal sudah mengeluarkan dana cukup besar, bahkan mendatangkan pelatih dari luar negeri. Mereka berharap adanya regulasi mengenai kasus perpindahan atlet. “Itu salah satu hal yang akan disampaikan dalam raker dengan Menpora,” kata Riefky menambahkan. (mp)/foto:mastur/parle/iw.

Komisi X Dorong Lebih Banyak Lagi Sekolah Yang Laksanakan UN Online

Komisi X DPR mendorong agar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) online atau Computer Based Test (CBT) bisa diperluas dan lebih banyak sekolah memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Sistem UN online selain disenangi anak-anak sekolah, juga lebih efisien dan mengurangi kecurangan serta mempermudah proses UN.

Demikian kesan yang diperoleh Tim Kunker Komisi X usai meninjau langsung pelaksanaan UN berbasis komputer di

SMP I dan SMP Muhammadiyah 12 Gresik, Jawa Timur, pekan lalu.

Ketua Tim Kunker Teuku Riefky Harsya menyatakan, apa yang dilihat dan didengar dari Kepala Sekolah, Wakil Bupati dan sejumlah siswa menyatakan senang (*enjoy*). Mereka berharap lebih banyak sekolah lagi sekolah yang melaksanakan CBT tahun mendatang. Karena itu Komisi X akan mendorong pemerintah pusat terkait penyediaan infrastruktur



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya kunjungi UN berbasis CBT di SMP I Gresik

komputer dan akses internet.

“Untuk pelaksanaan CBT maka diperlukan banyak komputer dan jaminan pasokan tenaga listrik. Perlu diantisipasi ketersediaan listrik selama UN berjalan, pasokan listrik harus tetap terjaga,” katanya. Ia juga mengapresiasi SMP Negeri I Gresik yang menyiapkan genset sebagai antisipasi

kalau listrik tiba-tiba mati.

Anggota Komisi X Jefirston Riwo Kore menyatakan meski anak-anak merasa *happy* dengan sistem UN online ini, tetapi ternyata sebagian komputer masih pinjam ke sekolah lain. Di sekolah ini hanya tersedia 50 unit komputer dari sebanyak 269 siswa, sehingga diatur bergiliran. “Karena itu Pemerintah harus berani berinvestasi untuk pengadaan komputer dan kepastian jaminan listriknya,” katanya dengan menambahkan, CBT ternyata lebih efisien dan mempermudah proses UN serta menghindari terjadinya kecurangan.

Politisi PAN yang juga artis Anang Hermansyah mengatakan, pelaksanaan UN CBT secara serentak perlu dukungan teknologi informasi yang memadai diantaranya penambahan jumlah komputer dan jaringan internetnya. Ia sependapat rekan lain Komisi X agar UN CBT bisa diterapkan lebih banyak lagi sekolah-sekolah sebab lebih praktis, efisien dan menghemat anggaran dibanding memakai lembaran naskah ujian.

“Untuk kota-kota besar pelaksanaan UN CBT bisa secara bertahap ditambah. Namun untuk daerah pedalaman dan perbatasan masih perlu waktu agak panjang,” kata Teuku Riefky menambahkan. (mp)/foto:mastur/parle/iw

Implementasi K-13 Perlu Dipercepat dan Diperluas



Tim Kunker Komisi X DPR di SMP Muhammadiyah 12 Gresik

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengharapkan agar implementasi Kurikulum tahun 2013 (K-13) perlu dipercepat dan diperluas. K-13 disiapkan untuk membentuk generasi emas Indonesia dan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Kalau tidak dipercepat sementara MEA sudah terbuka, kita khawatir

sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan semakin tersisih dari kancah Asean,” kata Riefky di sela-sela memimpin kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Timur, Rabu hingga Jumat (7-8/5).

Dalam kunker ini, selain meninjau langsung pelaksanaan UN di SMP 1, SMP Muhammadiyah 12 dan SMP Luar Biasa (LB) Gresik, juga menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim

Soekarwo dan jajaran, serta berdialog dengan sejumlah Rektor PTN se Jawa Timur di Universitas Airlangga (Unair).

Dari apa yang dilihat dan didengar di lapangan tidak hanya di Jatim tetapi juga di daerah lain, lanjut Riefky, dimana hampir seluruh sekolah sudah siap untuk mengimplementasikan K-13. Temuan itu juga semakin mempertegas bahwa saat itu Komisi X meminta pelaksanaan K-13 diminta ditunda dan dilaksanakan bertahap.

“Komisi X akan minta Mendikbud untuk lebih banyak sekolah yang menerapkan K-13,” tandas politisi Partai Demokrat ini menegaskan.

Rekannya Jefirston R. Riwo Kore juga menerima laporan bahwa para siswa senang dengan K-13. Temuan ini menjadikan prasangka buruk, seolah kalau ganti menteri maka harus “berbuat suatu yang baru”. Padahal yang baru itu belum tentu benar, terbukti anak-anak siswa merasa senang dengan diterapkannya K-13.

Ia melanjutkan, adanya pomeo ganti menteri ganti kebijakan (kurikulum), seolah dianggap benar. Karena itu ia mengharapkan Renstra Pendidikan dipelajari benar-benar oleh Menteri yang baru sehingga tidak membuat



arah berlawanan pendidikan yang merugikan siswa.

Sedangkan anggota FPG Popong Otje Djundjuran mengatakan, setiap kurikulum ada plus minusnya. K-13 merangsang anak menjadi aktif, kreatif dan proaktif sementara KTSP atau K-2006 lebih kepada pemberian pengajaran. Namun ia menilai lucu sampai ada sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 dan di sisi lain melaksanakan KTSP.

Saat itu kata Ceu Popong, Komisi X meminta K-13 dilaksanakan secara bertahap tidak dilaksanakan tahun itu juga, sehingga persiapannya matang diantaranya pelatihan guru dan bahan ajar disiapkan dengan baik. “Menteri sekarang ketempuhan (merasakan akibat) dari Menteri yang dulu yang terlalu tergesa-gesa menerapkan K-13,” ujarnya.

Tim Kunker Komisi X ke Jatim dipimpin Teuku Riefky Harsya (FPD)

dengan anggota Utut Adianto, Puti Guntur Soakarno (FPDI Perjuangan), Popong Otje Djundjuran (FPG), Mureno Soeprapto dan Ida Bagus Putu Sukarta (F Gerindra), Rinto Subekti, Jefirtson R. Riwu Kore, Muslim, Venna Melinda (FPD), Anang Hermansyah (F PAN), Nur Hasan Zaidi (F PKS), Reni Marlinawati (FPP), dan Kresna Dewanata Phrosakh (F Nasdem). (mp)/

foto:mastur/parle/iw

HNW Serap Aspirasi Sambil Badminton



Wakil Ketua MPR/Anggota DPR Hidayat Nur Wahid menyerahkan bingkisan usai pertandingan

Banyak cara dilakukan anggota DPR RI dalam melaksanakan tugasnya menjangkau aspirasi pada saat masa reses. Anggota dewan yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) punya pendekatan tersendiri yaitu sambil mengikuti pertandingan badminton persahabatan.

“Ini bagian dari kegiatan saya di masa reses, bertemu konstituen sambil mengikuti pertandingan badminton. Kita merancang kegiatan yang bermanfaat bagi konstituen, tidak formal yang penting bisa berkomunikasi dan menyerap aspirasi,” katanya disela-sela kegiatan di GOR Badminton,

Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (9/5/15).

Politisi Fraksi PKS dari daerah pemilihan DKI Jakarta II ini menyebut reses merupakan kesempatan untuk melaporkan kepada konstituen apa saja yang telah dilakukannya sebagai anggota dewan terutama sepanjang masa sidang lalu. Tidak jarang menurutnya sejumlah isu penting baru dapat dijelaskan dengan baik kepada para pemilih setelah bertemu secara langsung pada masa reses.

Baginya pendekatan dengan olah raga badminton menjadi pilihannya karena kebetulan dirinya juga sangat menggemari olah raga tepok bulu ini. Hal lain yang membuatnya terkejut adalah ketika sejumlah konstituen yang diajak bertanding di GOR Badminton DPR menyampaikan pengakuan baru pertama kali menginjakkan kaki ke kompleks parlemen.

“Wah saya juga *surprise* ternyata ada yang baru pertama kali ke DPR, padahal mereka tinggal di Mampang yang tidak terlalu jauh dari Senayan. Ada baiknya pada kesempatan tertentu mereka datang berkunjung dan mengamati langsung bagaimana para wakilnya bersidang,” ungkap dia.

Pertandingan badminton disamping diikuti oleh perwakilan konstituen juga diramaikan oleh karyawan Setjen DPR yang tergabung dalam Klub Parlemen Senayan. Usai kegiatan Hidayat memberikan bingkisan dan dana pembinaan olah raga badminton di wilayah setempat. (iky) *foto: ibnur/parle/hr*



Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Ermalena meninjau fasilitas RSUD Padang Panjang (kiri) dan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (kanan) di Provinsi Sumatera Barat, Senin (26/04) Foto: Andri/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pantau UN di SMP LB Gresik dan pantau UN Online SMP Muhammadiyah XII Gresik dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, Kamis (07/04) Foto: Mastur Prantono/Parle/IW



Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dipimpin I. G. A. Ray Wirajaya foto bersama dengan Kanwil Pajak, Bea Cukai, dan DJKN (kiri) penyerahan cinderamata diwakili Anggota Komisi XI DPR Roslinda Marpaung kepada Kanwil DJPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (kanan), Selasa (28/04) Foto: Iwan Armanias/Parle/IW